



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 23 April 2020

Halaman: 1

PEMDA DIY SIAP LARANG PEMUDIK Perlu Sanksi Tegas Pelanggar

YOGYA (KR) - Pemda DIY telah siap melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang warga mudik, guna mencegah penyebaran virus Korona (Covid-19). Namun demikian dalam pelaksanaannya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan larangan mudik bagi ma-

syarakat seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Adanya aturan baku tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai acuan untuk penerapan larangan mudik di daerah (DIY). "Nanti akan kami lihat secara rinci lagi, aturan larangan mudik dari Presiden dalam bentuk apa."

* Bersambung hal 7 kol 5

Perlu

Kalau seandainya nanti isinya di larang sama sekali untuk mudik, DIY akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah diputuskan oleh Presiden. Konsekuensi dari itu, arus kendaraan dari luar daerah baik angkutan umum maupun pribadi akan diseleksi secara lebih ketat. Semua itu dilakukan untuk meminimalisir adanya penularan Covid-19 di DIY," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Rabu (22/4).

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Tavip Agus Rayanto menegaskan tengah memastikan larangan mudik yang disampaikan Presiden Joko Widodo belum lama ini berlaku di DIY. Pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat

sebagai acuan penerapan larangan mudik di DIY saat ini.

"Pak Gubernur telah memberikan sinyal lampu hijau agar kebijakan ini diberlakukan mulai Jumat (24/4) dengan sasaran pendatang yang berasal dari daerah episentrum Covid-19 atau zona merah. Tetapi kami masih tunggu regulasinya karena arahan Presiden masih lisan. Saya sudah komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena regulasinya sedang dibahas hari ini," ungkap Tavip di Yogyakarta, Rabu (22/4).

Sementara itu, Komisi D

Sambungan hal 1

DPRD DIY mendorong kepada pemerintah daerah memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang nekat mudik. Mengingat mayoritas warga yang terkena virus Korona ini karena tertular dari warga luar daerah.

Ketua Komisi D DPRD DIY H Koeswanto SIP mengatakan, pemerintah pusat sudah menegaskan melarang masyarakat untuk mudik. Untuk menindaklanjuti itu, Komisi D mendorong pemerintah daerah memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang nekat mudik.

(Ria/Ira/Bro/Sni)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005